

# **Good Corporate Governance dan Manajemen Laba Memoderasi Hubungan *Related Party Transaction* Pada Agresivitas Penghindaran Pajak**

**I Gusti Ketut Wira Widiana<sup>1</sup>**

**Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra<sup>2</sup>**

**I Ketut Budiarta<sup>3</sup>**

**I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri<sup>4</sup>**

**<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana**

**\*Correspondences: [igkwira.widiana86@gmail.com](mailto:igkwira.widiana86@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan menguji hubungan *related party transaction* (RPT) pada agresivitas penghindaran pajak dengan *good Corporate Governance* dan manajemen laba sebagai pemoderasi. Penelitian dilakukan di BPR seluruh Bali dengan jumlah sampel adalah 137 BPR. Pengumpulan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui data publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik analisis data menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Sedangkan *good Corporate Governance* tidak terbukti menurunkan agresivitas penghindaran pajak RPT serta manajemen laba meningkatkan pengaruh RPT pada agresivitas penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Manajemen Laba; *Good Corporate Governance*; *Related Party Transaction*; Agresivitas Penghindaran Pajak.

## ***Profit Management and Good Corporate Governance Moderate Related Party Transaction Relationships On Tax avoidance Aggressiveness***

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the relationship of related party transactions (RPT) on aggressiveness of tax avoidance with good Corporate Governance and earnings management as moderating. The study was conducted in rural banks throughout Bali with a sample size of 137 rural banks. The sample was collected by using purposive sampling technique. Data collection is done through the publication of data from the Financial Services Authority (OJK). The data analysis technique used Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that related party transactions have a negative but not significant effect on the aggressiveness of tax avoidance. While good Corporate Governance is not proven to reduce the aggressiveness of RPT tax avoidance and earnings management increase the influence of RPT on the aggressiveness of tax avoidance.*

**Keywords:** Management of Profit; *Good Corporate Governance*; *Related Party Transaction*; Aggressiveness of Tax avoidance.



**e-ISSN 2302-8556**

Vol. 32 No. 4  
Denpasar, 26 April 2022  
Hal. 941-952

**DOI:**  
10.24843/EJA.2022.v32.i04.p09

### **PENGUTIPAN:**

Widiana, I. G. K. W.,  
Dwirandara, A. A. N. B.,  
Budiarta, I. K., & Putri, I. G.  
A. M. A. D. (2022). *Good Corporate Governance dan Manajemen Laba Memoderasi Hubungan Related Party Transaction Pada Agresivitas Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 941-952

### **RIWAYAT ARTIKEL:**

Artikel Masuk:  
26 Januari 2022  
Artikel Diterima:  
19 April 2022

**Artikel dapat diakses :** <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

## PENDAHULUAN

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, dimana mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment*, pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam penerimaan negara (Yasa & Martadinata, 2019), (Yasa, *et al*, 2021). Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari masyarakat yang telah memenuhi syarat dan dipaksakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang nantinya digunakan untuk kepentingan umum (Yasa, 2018). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan potensi penerimaan pajak, termasuk dalam hal meningkatkan potensi penerimaannya melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Namun dalam realisasinya, setiap tahun penerimaan pajak justru lebih kecil dari target. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dikutip melalui [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2018 secara berturut-turut adalah sebesar Rp 1.105,73 triliun, Rp1.151,03 triliun dan Rp1.315,51 triliun. Sedangkan target yang dibebankan adalah sebesar Rp1.355,20 triliun, Rp1.283,57 triliun dan Rp1.424 triliun. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah wajib pajak seringkali tidak melaporkan atau mencantumkan penghasilannya (Oktaviani & Nurhayati, 2017). Upaya ini dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari peningkatan beban pajak yang akan dibebankan terhadap penghasilan yang diterimanya. Upaya penurunan beban pajak ini menggambarkan tingkat agresivitas wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Bank merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Salah satu bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR menganggap pajak sebagai beban bank yang bisa mengurangi laba. Hal tersebut mendorong bank mengambil langkah untuk meminimalkan besaran pajak yang ditanggungnya, sehingga bank cenderung dipandang telah melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak. Frank, et.al (2009) menyatakan bahwa segala upaya atau usaha yang dilakukan bank dalam melakukan perencanaan pajak, dengan cara yang dikategorikan legal ataupun illegal disebut dengan agresivitas penghindaran pajak. Bank yang teridentifikasi memiliki kecenderungan agresif terhadap pajak identik akan rendahnya tingkat transparansi pada bank. Bukti-bukti empiris yang diperoleh memperlihatkan adanya indikasi tingginya tingkat agresivitas penghindaran pajak dikarenakan lemahnya tata kelola bank (Jimenez, 2008).

Beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak adalah *Related Party Transaction (RPT)*. *RPT* adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 2011). *RPT* memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan. Ada dua teori yang bertolak belakang mengenai *RPT* yaitu "*The Efficient Transaction Hypothesis*" dan "*The Conflict Of Interest Hypothesis*." Menurut

Kohlbeck & Mayhew (2010) transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi yang bersifat merugikan (*abusive RPT* berdasarkan *the conflict of interest hypothesis*) atau menguntungkan (*efficient RPT* berdasarkan *the efficient transaction hypothesis*). Pamulang (2019) menemukan bahwa hutang hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai hutang hubungan istimewa, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Rendahnya tarif pajak perusahaan, maka akan menurunkan tingkat agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Berdasarkan uraian teori, konsep, dan riset empiris di atas dapat dikatakan bahwa semakin kuat RPT maka semakin kecil agresivitas penghindaran pajak. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: *Related Party Transaction (RPT)* berpengaruh negatif pada agresivitas penghindaran pajak.

Variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG yang baik akan meningkatkan manajemen pajak perusahaan. Jumlah dewan komisaris sebagai bagian dari GCG ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan berjalan. GCG yang baik seharusnya terdiri dari dewan komisaris yang berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu menekan tingkat pajak perusahaan namun tidak melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki lebih banyak dewan komisaris lebih memiliki kesempatan menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang lebih sedikit. Fungsi pengawasan dewan komisaris mencakup pemberian nasihat ketika dewan direksi atau eksekutif mengambil keputusan. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat ketika direksi akan melakukan investasi. Dewan komisaris dapat menghindari pajak ketika memberikan nasihat kepada direksi atau eksekutif saat mengambil keputusan investasi. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat untuk mengambil investasi di atas 25% untuk menghindari pajak ketika deviden dibagikan. Pasal 4 ayat 3 (f) undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyebutkan "Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yaitu a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen dari jumlah modal yang disetor."

Dewan komisaris juga dapat menghindari pajak ketika memberi nasihat saat direksi akan mengambil keputusan untuk menerbitkan saham. Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan dengan memberi nasihat agar direksi menerbitkan saham minimal 40% untuk mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 5%. Pasal 17 ayat 2(b) menyebutkan wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima

persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Adanya jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, maka dalam setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan/bank akan semakin tinggi sehingga semakin menekan tarif pajak efektif perusahaan/bank. Riset empiris pengaruh GCG (jumlah dewan komisaris independen) pada agresivitas penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Fadhilah (2014) menyatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008, walaupun dari hasil uji statistik menunjukkan hasil yang berlawanan. Riset empiris lainnya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan insentif eksekutif dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap *tax avoidance* (Subekti, 2019). Hal senada juga didukung oleh Onyali *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa GCG memiliki pengaruh yang besar terhadap Agresivitas penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian konsep, dan riset empiris di atas dapat dikatakan bahwa semakin kuat GCG maka akan mampu memberikan pengaruh negatif RPT pada agresivitas penghindaran pajak. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: GCG (Jumlah dewan komisaris) memperlemah pengaruh negatif RPT pada agresivitas penghindaran pajak.

Manajemen laba merupakan variabel lain yang dianggap mempengaruhi wajib pajak melakukan agresivitas penghindaran pajak. Manajemen laba merupakan suatu tindakan dimana seorang manajer perusahaan melaporkan laba berdasarkan motif dan tujuan tertentu. Manajemen laba tidak bisa dilepaskan dari berbagai alasan dari seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan.

Dalam melakukan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya (Fadli *et al.*, 2016) Apabila manajer melaporkan dengan laba yang tinggi maka akan berpengaruh pada pajak yang dibayarkan dan pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan berkaitan langsung dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Laba tersebut dijadikan indikator utama dalam keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba yang disesuaikan dengan tujuannya yaitu untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Berdasarkan teori keagenan dijelaskan bahwa latar belakang terjadinya manajemen laba pada perusahaan yang merupakan implikasi dari adanya asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akibat adanya konflik kepentingan. Partiningsih & Asyik (2016) menyatakan bahwa teori keagenan mengelompokkan motivasi manajemen laba aktual dalam dua kategori: *opportunistic* dan *signaling*. Pada motivasi *signaling* dalam teori sinyal, manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak

*overstate*. Dengan motivasi *signalling*, manager dipersepsikan akan cenderung melaporkan laba sesuai kebijakan akuntansi dan tidak membesar-besarkan laba yang dilaporkan maka perusahaan tidak akan melakukan agresivitas penghindaran pajak.

Namun demikian Shelly *et al.* (2017) menyatakan bahwa Manajemen Laba terbukti mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut Tiaras & Wijaya (2015) juga mengungkapkan bahwa ternyata manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Demikian juga disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin manajemen bertindak agresif terhadap laporan keuangan yakni manajemen laba dengan teknik *income decreasing* maka diindikasikan bahwa manajemen bertindak agresif terhadap beban pajak guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian teori, konsep, dan riset empiris di atas dapat dikatakan bahwa semakin kuat Manajemen laba maka akan mereduksi pengaruh *RPT* pada Agresivitas Penghindaran Pajak. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Manajemen laba memperkuat pengaruh negatif *RPT* pada Agresivitas Penghindaran Pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di seluruh kantor BPR di wilayah Provinsi Bali selama tahun 2015-2020. Jumlah keseluruhan BPR yang ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 137 kantor di 9 Kabupaten/Kota yaitu, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Negara, Klungkung, Bangli, Buleleng dan Karangasem. Objek dalam penelitian ini adalah agresivitas penghindaran pajak (Y) yang dipengaruhi oleh *related party transaction* (X<sub>1</sub>) dan manajemen laba (Z<sub>1</sub>) serta *good Corporate Governance* (Z<sub>2</sub>) sebagai variabel pemoderasi.

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria diantaranya: 1) BPR yang telah melaporkan laporan keuangan ke BI dan OJK. 2) BPR tidak melakukan *corporate action* seperti akuisisi atau merger selama periode pengamatan. Bila perusahaan melakukan akuisisi dan merger selama periode pengamatan akan mengakibatkan variabel-variabel dalam penelitian mengalami perubahan yang tidak sebanding dengan periode sebelumnya. Sedangkan, bila suatu perusahaan dilikuidasi maka hasil penelitian tidak akan berguna karena perusahaan tersebut dimasa yang akan datang tidak lagi beroperasi. 3) Tidak memiliki laba dan total ekuitas negatif, karena saldo laba dan ekuitas yang negatif sebagai penyebut menjadi tidak bermakna dan 4) BPR tidak mengalami kerugian sebelum pajak karena dasar pengenaan pajak penghasilan adalah *Income Before Tax*. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah BPR yang dapat dijadikan sampel adalah sebanyak 85 BPR. Sedangkan untuk data yang bisa diolah berjumlah 304.

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi *Moderated Regression Analysis (MRA)* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur

interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan struktural regresi moderasi sebagai berikut: (Ghozali, 2002)

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_1.X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Rumus tersebut dikonversikan dalam simbol-simbol variabel sehingga menjadi persamaan sebagai berikut.

$$\text{CashETRit} = \alpha + \beta_1.\text{RPT} + \beta_2.\text{DK} + \beta_3.\text{IPL} + \beta_4.\text{MODERAT} + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- CashETR = agresivitas penghindaran pajak
- DK = Jumlah Dewan Komisaris Independen
- IPL = Manajemen Laba Indeks Perataan Laba (IPL)
- RPT = *Related Party Transaction*
- MODERAT = Perkalian antara politik organisasi dengan manajemen laba sebagai moderasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|                                  | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|----------------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| <i>Related Party Transaction</i> | 304 | 0,00    | 0,18    | 0,015 | 0,020          |
| <i>Good Corporate Governance</i> | 304 | 0,00    | 1,00    | 0,803 | 0,398          |
| <i>Indeks Perataan Laba</i>      | 304 | 0,05    | 48,45   | 1,701 | 3,271          |
| <i>Effective Tax Rate</i>        | 304 | -3,17   | 23,01   | 0,263 | 1,259          |
| <i>Valid N (listwise)</i>        | 304 |         |         |       |                |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dengan jumlah sampel adalah sebanyak 304, *Related Party Transaction* (RPT) 50 BPR di Provinsi Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, minimum sebesar 0,00 %, maksimum sebesar 0.18 , rata-rata 1.51 %, *Corporate Governance* (CG) Kabupaten/kota di Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, minimum sebesar 0,00%, maksimum sebesar 1,00 , rata-rata 0,80. Indeks Perataan Laba (IPL) Kabupaten/kota di Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, minimum sebesar Rp0,05%, maksimum sebesar 48,45%, rata-rata 1.70% dan *Effective Tax Rate* (ETR) Kabupaten/kota di Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, minimum sebesar -3,17%, maksimum sebesar 23,01% , rata-rata 0,263%

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas dianalisis menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *probability asymp.sig (2-tailed)* yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal.

**Tabel 2. Uji Normalitas**

|  |                       |        |
|--|-----------------------|--------|
| N                                      |                       | 304    |
| <i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i> | <i>Mean</i>           | 0,000  |
|  | <i>Std. Deviation</i> | 0,073  |
| <i>Most Extreme Differences</i>        | <i>Absolute</i>       | 0,093  |
|  | <i>Positive</i>       | 0,070  |
|  | <i>Negative</i>       | -0,093 |
| <i>Test Statistic</i>                  |                       | ,093   |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>          |                       | 0,020c |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar *Asymp. Sig.*

(2- tailed) sebesar  $0,020 > 0,050$ . Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan hasil dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute* residual terhadap variabel independen. Jika tingkat signifikan berada di atas 0,05 maka model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Uji heteroskedastisitas**

| Variabel   | Sig   | Keterangan                   |
|--|-------|------------------------------|
| <i>Related Party Transaction</i> (X <sub>1</sub> ) | 0,466 | Terbebas Heteroskedastisitas |
| <i>Good Corporate Governance</i> (Z <sub>1</sub> ) | 0,787 | Terbebas Heteroskedastisitas |
| Indeks Perataan Laba (Z <sub>2</sub> )             | 0,226 | Terbebas Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05 sehingga data penelitian dapat disimpulkan terbebas dari heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (10%), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variabel                         | Tolerance | VIF   |
|----------------------------------|-----------|-------|
| <i>Related Party Transaction</i> | 0,998     | 1,002 |
| <i>Good Corporate Governance</i> | 0,996     | 1,004 |
| Indeks Perataan Laba             | 0,994     | 1,006 |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai *tolerance* *Related Party Transaction* sebesar 0,998 dan nilai *VIF* sebesar 1,002. Nilai *tolerance* *Good Corporate Governance* sebesar 0,996 dan nilai *VIF* sebesar 1,004. Nilai *tolerance* Indeks Perataan Laba sebesar 0,994 dan nilai *VIF* sebesar 1,006. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih besar dari 10% (0,10) dan nilai *VIF* untuk semua variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <i>Durbin-Watson</i> | 2,026a |
|----------------------|--------|

Sumber: Data Penelitian, 2022

Sedangkan berdasarkan Tabel 5, hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* diperoleh hasil sebesar 2,026 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,732 dan kurang dari (4-du) 3,267 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis regresi adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat persamaan sebagai berikut.

$$\text{CashETRit} = 0.229 - 1.411.\text{RPT} + 0.000.\text{CG} - 0.43.\text{IPL} + 0.780.\text{MODERAT} + 2.225.\text{MODERAT} + e$$

**Tabel 6. Uji MRA**

| Variabel  | Unstandardized |            | Standardized | t      | sig   |
|---|----------------|------------|--------------|--------|-------|
|   | Coefficients   |            | Coefficients |        |       |
|   | B              | Std. Error | Beta         |        |       |
| <i>Related Party Transaction</i>                                  | -1,141         | 1,306      | -0,163       | -1,080 | 0,028 |
| <i>Good Corporate Governance</i>                                  | 0,000          | 0,017      | 0,001        | 0,015  | 0,988 |
| Indeks Perataan Laba  | 0,043          | 0,015      | -0,224       | -2,923 | 0,004 |
| <i>Related Party Transaction_Good Corporate Governance</i>        | 0,780          | 1,182      | -0,090       | -0,660 | 0,510 |
| <i>Related Party Transaction_Indeks Perataan Laba (Constanta)</i> | 2,225<br>0,229 | 0,949      | 0,280        | 2,334  | 0,020 |
| R <sup>2</sup>  | 0,233          |            |              |        |       |
| F   | 1,963          |            |              |        |       |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pengaruh RPT pada ETR adalah sebesar 0,028 yang lebih kecil daripada  $\alpha$  (0,05), dengan nilai koefisien beta sebesar -1,411, yang berarti bahwa RPT berpengaruh negatif tidak signifikan pada ETR. Hasil ini menerima hipotesis Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa RPT berpengaruh negatif signifikan pada ETR. RPT memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan Gordon *et al.* (2016). Menurut Kohlbeck dan Mayhew (2010) transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi yang bersifat merugikan (*abusive RPT* berdasarkan *the conflict of interest hypothesis*) atau menguntungkan (*efficient RPT* berdasarkan *the efficient transaction hypothesis*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktavia *et al.* (2012) menemukan bahwa hutang hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh GCG pada ETR adalah sebesar 0,988 yang lebih besar daripada  $\alpha$  (0,05) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,000, yang berarti bahwa GCG berpengaruh namun tidak signifikan pada ETR. Hasil ini menerima hipotesis 2 dimana GCG (Jumlah dewan komisaris) memperlemah pengaruh negatif RPT pada agresivitas penghindaran pajak. GCG yang baik akan meningkatkan manajemen pajak perusahaan (Minnick & Noga, 2010). Jumlah dewan komisaris sebagai bagian dari GCG ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan berjalan. Fungsi pengawasan dewan komisaris mencakup pemberian nasihat ketika dewan direksi atau eksekutif mengambil keputusan salah satunya dalam penerbitan saham. Adanya jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, maka dalam setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan/bank akan semakin tinggi sehingga semakin menekan tarif pajak efektif perusahaan/bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadhila (2014) dan Subekti (2019) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.

Sedangkan Pengaruh indeks perataan laba (IPL) pada ETR adalah sebesar 0,004 yang lebih kecil daripada  $\alpha$  (0,05), dengan nilai koefisien beta sebesar 0,043, yang berarti bahwa berpengaruh dan signifikan terhadap ETR. Hasil ini mendukung hipotesis 3 dimana Manajemen laba memperkuat pengaruh negatif RPT pada Agresivitas Penghindaran Pajak. Manajemen laba merupakan suatu tindakan dimana seorang manajer perusahaan melaporkan laba berdasarkan

motif dan tujuan tertentu. Manajemen laba tidak bisa dilepaskan dari berbagai alasan dari seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan. manajemen bertindak agresif terhadap laporan keuangan yakni manajemen laba dengan teknik *income decreasing* maka diindikasikan bahwa manajemen bertindak agresif terhadap beban pajak guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi (Handajani *et al*, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiaras dan Wijaya (2017) juga mengungkapkan bahwa ternyata manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) model Prediksian ETR ( $\hat{Y}$ ) adalah sebesar 23.3%. Hal ini berarti sebesar 23,3% variasi variabel terikat (ETR) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan moderasi dalam model (RPT, CG, IPL, RPT.CG dan RPT.IPL), sedangkan sisanya sebesar 76.7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan model prediksian ETR ( $\hat{Y}$ ) digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR maka dapat diketahui melalui uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada Tabel ANOVA, apabila nilai signifikansi  $F \leq \alpha$  (0,05), maka model ini dikatakan layak digunakan mengestimasi besarnya ETR, sebaliknya jika nilai  $\text{sig. } F > \alpha$  (0,05) maka model ini dikatakan tidak layak digunakan mengestimasi besarnya ETR. Hasil uji kelayakan model (uji F) tersaji pada tabel 4.10a. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai Sig.F adalah sebesar 0,044 yang lebih kecil daripada  $\alpha$  (0,05) sehingga dapat dikatakan model Prediksian ETR ( $\hat{Y}$ ) adalah layak digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR.

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R     | $R^2$ | $Adj.R^2$ | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|-------|-----------|----------------------------|
| 1     | 0,179 | 0,233 | 0,261     | 0,074                      |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) model Prediksian ETR ( $\hat{Y}$ ) adalah sebesar 23.3%. Hal ini berarti sebesar 23,3% variasi variabel terikat (ETR) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan moderasi dalam model (RPT, CG, IPL, RPT.CG dan RPT.IPL), sedangkan sisanya sebesar 76,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan model prediksian ETR ( $\hat{Y}$ ) digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR maka dapat diketahui melalui uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada Tabel ANOVA, apabila nilai signifikansi  $F \leq \alpha$  (0,05), maka model ini dikatakan layak digunakan mengestimasi besarnya ETR, sebaliknya jika nilai  $\text{sig. } F > \alpha$  (0,05) maka model ini dikatakan tidak layak digunakan mengestimasi besarnya ETR. Hasil uji kelayakan model (uji F) tersaji pada Tabel 6. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai Sig.F adalah sebesar 0,044 yang lebih kecil daripada  $\alpha$  (0,05) sehingga dapat dikatakan model Prediksian ETR ( $\hat{Y}$ ) adalah layak digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR.

## SIMPULAN

*Related Party Transaction (RPT)* adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terkait dengan aspek Perpajakan, RPT diduga dapat mempengaruhi Agresivitas Penghindaran Pajak. Selain itu Manajemen Laba dan GCG juga mampu untuk mempengaruhi RPT

dalam melakukan ETR. Penelitian ini dilakukan pada 137 unit BPR di Provinsi Bali dengan data dikumpulkan melalui website OJK. Responden dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *purposive sampling* dengan MRA sebagai teknik analisis data. Berdasarkan uji analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Meningkatnya *Related Party Transaction (RPT)* akan meningkatkan agresivitas penghindaran pajak; 2) *Good Corporate Governance (GCG)* tidak mampu memperlemah pengaruh *Related Party Transaction (RPT)* pada agresivitas penghindaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya BPR yang ada di provinsi Bali saja sehingga tidak dapat menyimpulkan kondisi riil BPR khususnya secara umum di Indonesia terhadap perilaku agresivitas penghindaran pajak. Selain itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uji koefisien determinasi hanya memiliki dampak 23,3%. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian khususnya dalam manajemen laba dengan menggunakan variabel *Discretionary Accruals*.

## REFERENSI

- Farahmita, A. (2011). Apakah Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Merupakan Insentif Untuk Melakukan Manajemen Laba? *Simposium Nasional Akuntansi*. Retrieved From <https://Repository.Maranatha.Edu/3943/>
- Bhasin, M. (2016). Survey Of Creative Accounting Practices : An Empirical Study. (January)
- Beaver, W. H., McNichols, M. F., & Wang, Z. Z. (2019). Increased market response to earnings announcements in the 21st century: An Empirical Investigation. *Journal of Accounting and Economics*, 101244. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.101244>
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1). Retrieved From <http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/908>
- Fadli, I. (Imam), Ratnawati, V. (Vince), & Kurnia, P. (Pipin). (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1205-1219. <https://Doi.Org/10.0/Css/All.Css>
- Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 2009. Retrieved From <https://Meridian.Allenpress.Com/Accounting-Review/Article-Abstract/84/2/467/53299>
- Jian, M & Wong, T. J. (2010). Propping through related party transactions. *Review of Accounting Studies* volume 15, pages70-105 (2010). <https://link.springer.com/article/10.1007/s11142-008-9081-4>
- Jimenez, E., Working, H. P.-W. B. P. R., & 2008, Undefined. (2008). Can Cost-Benefit Analysis Guide Education Policy In Developing Countries?

- Papers.Ssrn.Com.* Retrieved From  
[https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract\\_Id=1112191](https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=1112191)
- Lanis.R & Richardson.G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy Volume 30, Issue 1, January-February 2011, Pages 50-70.*  
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Kanagaretnam, K., Lee.J.,Lim,CY & Lobo,GJ., (2016) Cross-Country Evidence on the Role of Independent Media in Constraining Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Business Ethics volume 150, pages879-902.*  
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3168-9>
- Kim, I. (2015). Directors' and officers' insurance and opportunism in accounting choice. 7(1), 51-65.
- Marchini.PL., Mazza.T., & Medioli.A. (2018). The impact of related party transactions on earnings management: some insights from the Italian context. *Journal of Management and Governance volume 22, pages981-1014 (2018).* <https://link.springer.com/article/10.1007/s10997-018-9415-y>
- Meita,OR.,Eka.,PY.,Sunarto., Afifaful,J. (2021). The Effect of *Leverage*, Earning Management, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business Volume 8 Issue 7/Pages.501-508/2021*
- Ogbeide, Sunday Oseiweh dan Obaretin, Osasu. 2018. Good Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. *Amity Journal of Good Corporate Governance 3 (1), (1-12)*
- Oktaviani, R. M., & Nurhayati, I. (2017). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Feb Untag.*
- Partiningsih Dn, & Asyik, N. (2016). Pengaruh Faktor Keuangan, Non Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi: Manajemen Laba Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(1).* Retrieved From [Http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/Download/1443/1458](http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/Download/1443/1458)
- Sapta Setia Darma. (2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang P, 7(1).*
- Shelly, N., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 1901-1914.* <https://Doi.Org/10.0/Css/All.Css>
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, 19(3), 380-397.*  
<https://Doi.Org/10.24912/Ja.V19i3.87>
- Ratnawati,V.,Wahyunir,N & Abduh,A. (2019). The Effect Of Institutional Ownership, Board Of Commissioners, Audit Committee On Tax Aggressiveness; Firm Size As A Moderating Variable. *International Journal of*

- Business and Economy*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 103-114, sep. 2019. ISSN 2682-8359.  
<https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbec/article/view/7829>
- Walker, M. (2013). How far can we trust earnings numbers? What research tells us about earnings management. *Accounting and Business Research*, 43(4), 445–481. <https://doi.org/10.1080/00014788.2013.785823>
- Wang, H.D., Cho, C.C. & Lin, C.J. (2019). Related party transactions, business relatedness, and firm performance. *Journal of Business Research* Vol;101. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.066>
- Yasa, I. N. (2018). Pengujian Kewajiban Moral Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Jurnal Riset Akuntansi (Juara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 50–57. Retrieved From [Http://E-Journal.Unmas.Ac.Id/Index.Php/Juara/Article/View/29](http://E-Journal.Unmas.Ac.Id/Index.Php/Juara/Article/View/29)
- Yasa, I. N., & Martadinata, I. P. (2019). Taxpayer Compliance From The Perspective Of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53. <https://doi.org/10.9744/Jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). Tax Comprehension And Ethics Education Integration In Improving Tax Compliance Among Accounting Students. *International Journal Of Finance & Banking Studies* (2147-4486), 10(1), 96–108. <https://doi.org/10.20525/Ijfb.V10i1.1159>